

**POLEMIK ARTIKEL BELADJAR MEMAHAMI SUKARNOISME KARYA SAYUTI MELIK
TAHUN 1964**

DAVID NURMANSYAH

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: david.nurmansyah28@gmail.com

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Sayuti Melik dikenal sebagai tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan dan tokoh PNI sekaligus pribadi yang dekat dengan Sukarno. Pada masa Demokrasi Terpimpin, ia menulis artikel bersambung yang berjudul Beladjar Memahami Sukarnoisme dan menimbulkan dampak besar yaitu sebuah pergolakan dalam bidang pers.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa latar belakang terjadinya pergolakan pers di Indonesia tahun 1964? (2) Bagaimana esensi tulisan Beladjar Memahami Sukarnoisme karya Sayuti Melik dalam pergolakan pers di Indonesia? (3) Bagaimana peran Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dalam mendukung artikel bersambung Beladjar Memahami Sukarnoisme karya Sayuti Melik? Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan bagaimana Sayuti Melik melalui artikelnya ingin menunjukkan kepada masyarakat agar dapat memisahkan ajaran Marxisme-Leninisme dengan Sukarnoisme. Sayuti Melik menilai bahwa terdapat perbedaan antara Sukarnoisme dan Marxisme dalam segi filosofis. Sukarnoisme menerapkan dialektis idealisme dan dialektis materialisme secara bersamaan, sedangkan Marxisme hanya menggunakan dialektis materialisme saja.

Artikel ini dipublikasikan pertama kali di surat kabar Berita Indonesia dan diikuti oleh sekitar 50 surat kabar di seluruh Indonesia. Penyebarluasan artikel ini dilakukan oleh BPS dan mendapat reaksi tentangan dari PKI karena dianggap sebagai komunisto-phobi. Setelah itu pers Indonesia menjadi terpolarisasi menjadi pendukung artikel Sayuti Melik dan pendukung PKI. Dimulai pada Juli 1964 hingga Desember 1964, surat kabar PKI yaitu Harian Rakjat dengan pers BPS terutama Berita Indonesia dan Merdeka saling mengkritik terkait dengan bagaimana ajaran-ajaran Sukarno yang paling benar.

Kata Kunci: Sayuti Melik, Sukarnoisme, BPS, PKI.

Abstract

Sayuti Melik known as the man who typed the copy of Independence Proclamation of Indonesia, a member of PNI and the man that close to Soekarno. In Demokrasi Terpimpin era, he wrote a serial article with the title "Beladjar Memahami Sukarnoisme". That article have a big impact that an upheaval press in Indonesia.

The probems of this study are (1) What is the background of upheaval press in Indonesia 1964? (2) How to understand the essence of "Beladjar Memahami Sukarnoisme" by SayutiMelik of upheaval press in Indonesia? (3) how does the role of BPS to support the article "Beladjar Memahami Sukarnoisme" by Sayuti Melik? The method that used by the author is historical research to describe the problems include: heuristic, criticism, interpretation and historiography.

The results of the study explains that Sayuti Melik want to show to the public to insulate Marxisme-Leninism ideology with Sukarnoism by his article. Sayuti Melik appraise that there is a difference between Sukarnoism and Marxism in philosophical terms. Sukarnoism applying dialectical idealism and dialectical materialism simultaneously, while the Marxism only use the dialectical matrealism.

For the first time, this article was published in the Berita Indonesia newspaper and attended by about 50 newspapers in Indonesia. Dissemination of article which was done by BPS and got opposition reaction from PKI because it is considered as a communist-phoby. After that, press in Indonesia became polarized into a supporting articles to Sayuti Melik and PKI. Started in July 1964 until December 1964,

Harian Rakjat newspaper by PKI with press of BPS especially Berita Indonesia and Merdeka criticize each other about what is the most correct from the precepts of Soekarno.

Keywords: Sayuti Melik, Sukarnoism, BPS, PKI.

PENDAHULUAN

Pers merupakan media untuk menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Informasi berita yang disampaikan berhubungan dengan peristiwa yang bersifat aktual dan memuat fakta, baik yang telah lampau maupun yang sedang terjadi. Berita-berita yang dimuat tidak hanya dalam lingkup internasional dan nasional namun juga dalam lingkup yang lebih sempit yaitu kedaerahan.

Menurut fungsinya pers dapat digunakan sebagai alat dalam melaksanakan kontrol sosial, memberikan informasi dan hiburan. Berita-berita yang dimuat dalam berbagai macam media seperti surat kabar, televisi, radio dan sebagainya menampilkan informasi yang meliputi beragam aspek kehidupan. Berdasarkan fungsi tersebut pers memiliki tempat yang penting dalam masyarakat. Kehadiran pers menjadi sebuah hal yang pokok karena dengan pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan mampu memengaruhi masyarakat dalam berbagai hal.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pers mengalami berbagai pembaharuan kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Pelaksanaan Manipolisasi Pers Nasional dengan sistem Demokrasi Terpimpin mulai diberlakukan. Media massa seperti surat kabar, radio dan televisi harus dapat digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpimpin, berencana dan terus-menerus kearah kesadaran menuju sosialisme Indonesia dan Pancasila.¹ Dengan kata lain media massa harus dapat menjadi alat penggerak bagi masyarakat agar bertindak revolusioner.

Hubungan antara pers dan politik dapat terjalin cukup erat tidak hanya pada masa Demokrasi Terpimpin, namun sudah berlangsung sejak masa-masa sebelumnya. Sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, pers tentu menjadi alat utama bagi partai politik untuk menyebarluaskan informasi terkait gagasan dan ideologi masing-masing partai. Serta media dalam menarik simpati masyarakat terhadap partai yang bersangkutan.

Demokrasi Terpimpin menjadi saat dimana PKI berusaha untuk mendapatkan pengaruh sebesar mungkin. Mereka mendirikan banyak organisasi sayap yang bergerak dalam berbagai bidang. Selain itu arah gerak

politik mereka juga mendukung kebijakan pemerintah presiden Sukarno. Dukungan terhadap pemerintah agaknya bertujuan agar posisi PKI dalam berbagai lembaga strategis negara tetap dapat digenggam.

Pada kenyataannya dimasa Demokrasi Terpimpin, konstelasi politik Indonesia tidak hanya tentang PKI saja. Setidaknya masih ada dua kekuatan politik besar lainnya yang dapat disejajarkan dengannya, yaitu presiden Sukarno dan Angkatan Bersenjata. PKI ketika itu ialah partai yang sudah terstruktur dengan baik dan memiliki jaringan yang sangat luas. Walaupun demikian tidak berarti semua rakyat Indonesia bersimpati atau mendukung pergerakan partai tersebut.

Golongan-golongan atau pribadi yang memiliki pengalaman buruk ketika berjuang bersama-sama PKI pada masa pergerakan maupun sesudahnya telah memupuk sentimentil mereka terhadap partai tersebut. Dapat dipahami bersama bahwa arah gerak PKI pada masa perjuangan pergerakan maupun masa revolusi fisik ialah dengan jalan bawah tanah dan terkenal sangat radikal. Selain itu hal yang menjadi dasar utama kecenderungan untuk membenci PKI adalah semata-mata karena perbedaan ideologi. Demikian pula sebaliknya dengan kacamata kebencian PKI dalam melihat setiap lawan politiknya.

Harus diakui bahwa presiden Sukarno adalah seorang tokoh yang memiliki kemampuan terhadap strategi politik yang sangat baik. Ia dapat dengan mudah menghancurkan pihak-pihak yang mencoba melawan dengan tanpa ada kekhawatiran kehilangan cinta dari rakyatnya. Sedangkan dua kekuatan disamping kanan dan kiri Sukarno adalah dua golongan yang dapat dikatakan berseberangan dan selalu berupaya menekan satu sama lain. Walaupun demikian mereka tetap patuh pada Sukarno beserta seluruh kebijakannya, bahkan menggunakan Sukarno sebagai bahan untuk menghancurkan satu sama lain.

Dalam satu sisi pihak-pihak yang anti PKI tidak ingin partai tersebut menjadi semakin besar dengan pengaruh semakin luas. Demikian juga sebaliknya, PKI tetap berusaha dengan keras agar pihak-pihak yang dianggap dapat menghalangi tujuannya supaya dapat disingkirkan. Realitas semacam ini semakin meruncing ketika memasuki tahun 1960an. Berbagai polemik dan pergolakan terjadi di masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh nasional maupun elit politik dari berbagai golongan yang berseberangan tersebut.

¹Tribuana Said, *Sejarah pers nasional dan pembangunan pers pancasila*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1988) hlm. 122.

Jargon politik sebagai panglima yang dicetuskan oleh presiden Sukarno agaknya telah benar-benar merasuk dalam jiwa segenap rakyat Indonesia terutama insan politik. Walaupun banyak organisasi sayap partai politik dibentuk sebelum masa Demokrasi Terpimpin, jargon tersebut telah memberikan semangat tersendiri bagi partai politik untuk bergerak dalam langkah perluasan pengaruh partai dalam masyarakat. Dapat dicermati dalam bidang persuratkabaran, kebudayaan, kepemudaan, kemahasiswaan, profesi dan masih banyak lagi menunjukkan telah ada pengaruh partai politik disana.

Dapat pula kita mengambil contoh pada kebudayaan, dalam bidang tersebut telah eksis berbagai organisasi partai politik maupun golongan-golongan yang memiliki sikap politik seperti Lekra, LKN dan Lesbumi serta Manifes kebudayaan. Dalam bidang persuratkabaran atau pers jelas menunjukkan bahwa setiap partai politik memiliki satu pers resmi dan banyak pers afiliasi yang mendukung penuh kebijakan partai. Demikian pula dengan kemahasiswaan, disana telah berdiri banyak organisasi ekstra kampus seperti GMNI, CGMI, PMII, HMI dan sebagainya.

Berbagai partai politik beserta organisasi sayapnya maupun golongan-golongan yang memiliki sikap politik saling berlomba menunjukkan kekuatannya dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Upaya-upaya represif terhadap kubu seberang yang dianggap lawan tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi seluruh kebijakan presiden Sukarno. Tentu saja berada dibelakang presiden Sukarno jauh lebih aman daripada berdiri menantang dihadapannya.

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Sayuti Melik dalam dunia pers dan pemikiran menjelang kejatuhan kekuasaan presiden Sukarno tepatnya pada 1964. Karya Sayuti Melik telah menjadi semacam pelengkap dari situasi nasional yang panas terhadap perbedaan pandangan dan sikap politik. Sayuti Melik meramalkan konstelasi politik yang memang telah bersuhu tinggi dengan caranya sendiri yaitu memberikan sumbangan pikiran tentang ajaran Sukarno yang didukung oleh Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Tidak hanya berisi pedoman atau ajaran-ajaran bagaimana menjadi Sukarnois yang baik, lebih dari itu ia juga sengaja memasukkan bahan-bahan yang mengandung sentimen negatif terhadap eksistensi PKI.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: (1) Apa latar belakang terjadinya pergolakan pers di Indonesia tahun 1964; (2) Bagaimana esensi tulisan *Beladjar Memahami Sukarnoisme* karya Sayuti Melik dalam pergolakan pers di Indonesia; (3) Bagaimana peran Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dalam mendukung

artikel bersambung *Beladjar Memahami Sukarnoisme* karya Sayuti Melik.

METODE

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan dan kesimpulan yang sesuai, fakta dan kesimpulan tersebut diperoleh dari rangkaian tahap dalam penelitian yang sistematis dengan cara mengumpulkan, memverifikasi dan mencari keterkaitan antara bukti-bukti sejarah yang didapatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan metode penelitian sejarah merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh Sejarawan.

Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dapat menunjang atau mendukung penelitian yang sedang dilakukan baik sumber primer maupun sekunder. Pada langkah yang pertama ini penulis telah berhasil mengumpulkan beberapa sumber yang dapat menjadi penguat atau pendukung dalam penyusunan hasil penelitian.

Sumber-sumber primer yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis yaitu buku kumpulan artikel Sayuti Melik berjudul *Beladjar Memahami Sukarnoisme* yang diterbitkan oleh Yayasan B.P. „Lontarsari” pada 1964, buku kumpulan artikel kritik surat kabar *Harian Rakyat* terhadap artikel Sayuti Melik berjudul *BPS Aksi dan Reaksi* yang diterbitkan oleh PT. Rakyat pada 1965, artikel berjudul *Sukarnois harus berdjiva Sukarnoisme* yang dimuat dalam *Majalah Sketmasa* no. 1 Th VIII tahun 1964, artikel berjudul *Siapa pendukung Sukarnoisme?* yang ditulis oleh Soeripto Putra Djaja dalam *Majalah Sketmasa* no. 1 Th VIII tahun 1964.

Penelusuran sumber-sumber sekunder seperti artikel berjudul *Bekas Orang-orang Yang Dibreidel* dalam *majalah Tempo* tahun 1982 dan artikel berjudul *Apakah Itu BPS.....?* dimuat dalam *Buana Minggu* tahun 1982, diperoleh dari perpustakaan perpustakaan *Medayu Agung Surabaya*. Sedangkan buku berjudul *Pembreidelan Pers Di Indonesia* oleh Edward C. Smith diperoleh dari Perpustakaan Daerah Jawa Timur.

Kritik yang dilakukan dengan memcermati dan memverifikasi sumber-sumber yang sesuai dengan bahasan penelitian. Sumber tentang keadaan politik Indonesia pada masa Orde Lama dan pers masa Orde Lama. Selain itu juga memverifikasi tentang sumber-sumber artikel Sayuti Melik yang membahas ajaran Sukarno.

Langkah kedua adalah pelaksanaan kritik sejarah yang terbagi menjadi dua bentuk yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern lebih menonjolkan pada originalitas bahan yang dipakai membuat dokumen,

seperti sumber yang digunakan penulis berupa artikel pada beberapa koran yang pada 1964. Sedangkan kritik intern lebih memperhitungkan kebenaran isi sumber atau dokumen. Fokus utama dari kritik intern adalah berusaha membuktikan bahwa kesaksian sumber dapat dipercaya.

Tahap selanjutnya yakni interpretasi data dilakukan setelah semua fakta berdasarkan data terkumpul dan disusun secara kronologis. Dari sini maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan atau diperoleh makna-makna yang saling berkaitan dari fakta-fakta yang diperoleh.

Langkah terakhir adalah historiografi yang merupakan proses akhir pada penulisan metode penelitian sejarah. Pada tahapan historiografi peneliti melakukan penulisan sejarah secara kronologi, dimulai dari latar belakang mengapa Sayuti Melik mulai menulis artikel tentang Sukarnoisme, bagaimana isi artikel-artikel tersebut dan menganalisis bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh berbagai pihak atas terbitnya artikel Sayuti Melik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Perjuangan Sayuti Melik

a. Keluar Masuk Penjara

Sebagai tokoh yang aktif dalam banyak kegiatan perjuangan, Sayuti Melik menjadi salah seorang tokoh yang menjadi incaran Belanda. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sayuti Melik terutama yang berkaitan dengan perjuangan diawasi dengan ketat dan bahkan dilakukan penangkapan terhadapnya oleh Belanda.

Sayuti Melik telah keluar masuk diberbagai penjara selama masa pergerakan Indonesia. Dalam konteks pemberontakan PKI tahun 1926, Sayuti Melik nampaknya menjadi salah satu tokoh yang dicurigai oleh Belanda memiliki keterlibatan terhadap peristiwa tersebut. Ia ditahan di Banyumas pada tahun yang sama kemudian dipindah ke Boven Digul² pada tahun 1927 dan bebas pada 1933.

Tidak hanya berhenti hingga Boven Digul, Sayuti Melik juga pernah dipenjara di Singapura. Hal yang membawanya hingga Singapura ialah kabar yang menyatakan bahwa ada seorang pejuang Indonesia yang bernama Amir Hamzah Siregar berada di Singapura dan baru saja datang dari Amerika yang berniat untuk kembali ke Indonesia.

Sayuti Melik terlibat dalam sebuah organisasi bawah tanah yang bernama *Southeast Asia Anti Imperialism League* atau Liga Anti Imperialisme Asia Tenggara. Ia aktif dalam organisasi tersebut bersama

dengan orang-orang Melayu, China, Vietnam, Filipina, Inggris dan Perancis.³

Pada 1936 ia ditangkap dan ditahan selama satu tahun oleh polisi rahasia Inggris karena kegiatan politiknya. Pada awal 1937 melalui surat deportasi dari pihak kolonial di Singapura, ia dipulangkan ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia Sayuti Melik ditahan di penjara Gang Tengah Jakarta hingga awal 1938.

Selain Belanda, Jepang juga turut melakukan penahanan terhadap Sayuti Melik. Pada 1942 ia dituduh oleh Jepang memiliki hubungan dan dianggap bertanggung jawab atas tindakan PKI yang mengancam Jepang. Ancaman yang dimaksud Jepang ialah adanya pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat untuk bersatu menentang kedatangan dan membunuh tentara Jepang.

Hukuman penjara selama 3 tahun tanpa masa potong tahanan sebagai akibat dari peristiwa pamflet PKI yang terjadi di Semarang harus dijalani oleh Sayuti Melik. Keputusan tersebut dihasilkan pada 1943 dan menetapkan penjara Ambarawa sebagai tempat penahanannya.

b. Peran Sayuti Melik Dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sayuti Melik memperoleh kebebasan setelah menjadi tahanan di penjara Ambarawa pada tahun 1945. Setelah dinyatakan bebas ia kemudian pulang menuju ke kota Semarang. Di kota Semarang Sayuti Melik menerima surat yang dikirim oleh Sukarno dan Mohammad Hatta selaku ketua dan wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Isi surat tersebut ialah permintaan agar ia segera berangkat ke Jakarta untuk membantu perjuangan tokoh-tokoh lainnya dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sayuti Melik tidak dapat langsung bertemu dengan Sukarno dan Mohammad Hatta ketika baru saja tiba di Jakarta. Ketika itu mereka sedang berada di Saigon untuk menghadiri pertemuan dengan Jenderal Terauchi.⁴ Ia baru dapat bertemu dan berdiskusi dengan presiden Sukarno pada 15 Agustus 1945 di kediaman Sukarno Jalan Pegangsaan Timur Jakarta.

Sayuti Melik mengeluarkan pendapatnya terkait dengan bagian akhir dari naskah proklamasi dalam rapat penyusunan naskah proklamasi di rumah Laksamana Madya Maeda. Ia mengusulkan naskah proklamasi tetap ditandatangani oleh Sukarno dan Mohammad Hatta. Dua tokoh ini menurut Sayuti Melik dapat diterima oleh semua pihak yang hadir dalam rapat tersebut sebagai tokoh yang harus memberikan tandatangannya. Pendapatnya

³Arief Priyadi, *Wawancara Dengan Sayuti Melik*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1986) Hlm. 15.

⁴Suhartono, *Kaigun: Angkatan Laut Jepang Penentu Krisis Proklamasi*, (Yogyakarta : Impulse. 2016) hlm. 33-34.

²Takahi Siraishi, *Hantu Digoel : Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2001) hlm. 5.

disepakati oleh semua pihak yang hadir dalam rapat penyusunan tersebut. Sukarno kemudian memerintahkannya untuk mengetik naskah tersebut.

Sayuti Melik melakukan perubahan pada kalimat “Wakil-wakil bangsa Indonesia” yang ada pada naskah hasil tulisan Sukarno menjadi “Atas nama Bangsa Indonesia” kemudian ditambahkan kata “Soekarno-Hatta”. Naskah hasil ketikan Sayuti Melik tersebut yang kemudian menjadi naskah proklamasi resmi dan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 oleh Sukarno.

c. Sayuti Melik Sebagai Jurnalis

Pada sekitar tahun 1923 diskusi atau pembicaraan tentang politik yang sering diikutinya nampaknya sudah menjadi sebuah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan, karena Belanda akan segera melarang kegiatan semacam itu. Maka untuk dapat menyalurkan semangat perlawanan tersebut ia memutuskan untuk menulis melalui surat kabar.

Tidak hanya dalam satu surat kabar, Sayuti Melik banyak menulis kritik terhadap Belanda pada beberapa surat kabar yang terbit di beberapa kota. Tulisan-tulisan pertamanya dapat dijumpai di surat kabar *Islam Bergerak* yang terbit di Solo, *Sinar Hindia* terbit di Semarang dan *Penggugah* yang terbit di Yogyakarta.

Pada 1939 Sayuti Melik ditahan oleh Belanda karena mendirikan majalah *Pesat*. Pendirian majalah tersebut atas gagasan bersama antara Sayuti Melik dengan istrinya yaitu S.K Trimurti.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada Maret 1942 mereka memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan pihak Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan baik dalam lingkup pemerintahan maupun persuratkabaran. Hasilnya adalah surat kabar *Pesat* harus dibubarkan dan mendirikan surat kabar baru yang diberi nama *Sinar Baru*.

Aktifitas jurnalistik Sayuti Melik tetap berlanjut ketika Indonesia telah memperoleh kemerdekaan. Pada 1 Oktober 1953 *Harian Suluh Indonesia* didirikan sebagai media propaganda atau penyebaran program serta informasi terkait PNI. *Suluh Indonesia* terbit setelah ketua PNI ketika itu yang dijabat oleh Sidik Djokokusumo meminta kepada para anggota partai seperti Mohammad Arsjad, M. Tabrani, M.A. Pane dan Rufinus Tobing untuk membuat sebuah surat kabar.⁵ Setelah *Suluh Indonesia* terbentuk, tokoh yang dipercaya sebagai ketua redaksi adalah Sayuti Melik.

d. Karir Politik Sayuti Melik Setelah Kemerdekaan

Sayuti Melik tetap terlibat dalam organisasi penting setelah kemerdekaan. Tepatnya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada 18 Agustus 1945 Sukarno melakukan penambahan terhadap keanggotaan PPKI. Penambahan anggota PPKI tersebut dilakukan dalam sidang di kantor Sanyo, Pejambon 1. Terdapat enam anggota baru yang telah resmi bergabung dalam keanggotaan PPKI, yaitu RAA. Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Subardjo.⁶

Sayuti Melik juga termasuk dalam keanggotaan partai politik. Bersama 4 tokoh lainnya yaitu Iwa Kusumasumantri, Mr. Sudjono, Wikana dan Mr. A.A Maramis, ia ditetapkan sebagai pengurus harian PNI Pada 27 Agustus 1945.

Dapat dikatakan bahwa aktifitas politik Sayuti Melik setelah kemerdekaan Indonesia lebih banyak dilakukan dalam lembaga-lembaga tinggi negara. Pada 1950 ia menjadi anggota MPRS dan DPR GR mewakili angkatan 45'. Pada 1964 ia berhenti dan memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan MPRS dan DPR GR.

B. Polemik Artikel *Bersambung Beladjar Memahami Sukarnoisme* Karya Sayuti Melik Tahun 1964

a. Latar Belakang Sayuti Melik Menulis Artikel *Beladjar Memahami Sukarnoisme*

Selain ahli dalam kegiatan jurnalistik, Sayuti Melik juga mumpuni dalam hal ilmu perjuangan atau ideologi. Kemampuan dalam dua hal berbeda yang saling berkesinambungan itu telah mengantarkannya pada titik sebagai wartawan sekaligus pejuang dan pemikir.

Ketika sistem pemerintahan Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin, Sayuti Melik merasa bahwa suhu politik tidak kalah panasnya dibanding dengan masa demokrasi parlementer yang berlangsung sebelumnya. Terlebih lagi hubungan dekat antara orang-orang PKI dengan presiden Sukarno secara politik telah memicu sentimen negatif dari pihak-pihak yang tidak menghendaki komunisme.

Sebagai mantan guru Marhaenisme dan mantan kader senior PNI, Sayuti Melik memiliki pemahaman yang baik mengenai ajaran Sukarno. Melalui tulisan tentang Sukarnoisme, ia ingin menyebar luaskan bagaimana menjadi pengikut Sukarno yang baik dan mencoba untuk memisahkan antara ajaran Sukarno yang murni sebagai kepribadian bangsa dengan paham Marxisme-Leninisme yang menjadi pedoman orang-orang Komunis.

Pada 1963 Sayuti Melik aktif menyebarkan doktrin-doktrin Marhaenisme melalui surat kabar. Ia

⁵<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3012/Suluh-Indonesia>. diakses pada 13 Agustus 2016, pukul 16.00 WIB.

⁶Suhartono., *op.cit*, hlm. 164.

menulis artikel berisi ajaran-ajaran Sukarno yang diberi judul *Pembinaan Jiwa Marhaenisme* dan dimuat dalam surat kabar *Suluh Indonesia*. Langkah tersebut diambilnya sebagai sikap tegas sehubungan konstelasi politik yang terjadi.

Sayuti Melik mencoba untuk menuliskan bagaimana ajaran-ajaran Sukarno yang berbeda dengan hasil putusan hasil sidang BPK I di Bandung pada 1964. Dalam sidang tersebut PNI menetapkan dan memperjelas definisi Marhaenisme yang selama bertahun-tahun bersifat kurang jelas. Dalam sidang BPK I tersebut, Marhaenisme telah didefinisikan sebagai Marxisme yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia.⁷

Sedangkan rumusan-rumusan Sayuti Melik tentang Marhaenisme dalam *Suluh Indonesia* pada 1963 mencoba untuk memberi batasan perbedaan antara Marhaenisme dengan Marxisme-Leninisme. Sehingga ia terlibat pertentangan dengan DPP-PNI yang menganggap tulisan-tulisannya berlainan dengan Marhaenisme yang digariskan partai. Hasilnya ia mengundurkan diri dari keanggotaan redaksi surat kabar *Suluh Indonesia* sekaligus dari keanggotaan PNI.⁸

Ketika tidak lagi menjadi anggota PNI sekaligus *Suluh Indonesia*, bukan berarti kontribusi Sayuti Melik dalam dunia persuratkabaran berakhir. Ia masih tetap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dalam surat kabar *Suluh Indonesia* sebelumnya yaitu menyebarluaskan ajaran-ajaran Sukarno. Ia hanya merubah judul artikel-artikelnya dari yang semula *Pembinaan Djiwa Marhaenisme* pada 1963 menjadi *Beladjar Memahami Sukarnoisme* yang terbit di surat kabar *Berita Indonesia* pada 1964.

b. Esensi Dan Polemik Artikel Bersambung *Beladjar Memahami Sukarnoisme*

Dalam artikel bersambung *Beladjar Memahami Sukarnoisme*, Sayuti Melik banyak memberikan pendapat dan pemikirannya tentang bagaimana menjadi pengikut atau murid Sukarno yang baik. Ia menilai bahwa ajaran-ajaran tersebut masih relevan dan akan tetap sesuai dengan arah gerak perjuangan bangsa.

Sayuti Melik menggunakan istilah Sukarnoisme sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran sang guru dalam rangka penghormatannya sebagai murid serta pengikut Sukarno. Ia menyebut ajaran Sukarno dengan Sukarnoisme setelah mengamati penggunaan istilah dari paham atau pemikiran populer sebelumnya yang menggunakan nama tokoh yang bersangkutan. Seperti ajaran Karl Marx yang disebut Marxisme, ajaran Darwin

yang disebut Darwinisme serta ajaran Lenin disebut Leninisme dan sebagainya.⁹

Sedangkan Sukarno memberi nama untuk ajaran-ajarannya dengan istilah Marhaenisme, yakni sebagai bentuk keprihatinan kepada seorang petani kecil yang bernama Marhaen. Marhaen telah menjadi sebuah simbol kemiskinan yang luas dan tidak terikat hanya pada salah satu kaum.¹⁰

Sayuti Melik menilai bahwa terdapat perbedaan antara Sukarnoisme dan Marxisme dalam segi filosofis. Sukarnoisme menerapkan dialektis idealisme dan juga dialektis materialisme secara bersamaan, sedangkan Marxisme hanya menggunakan dialektis materialisme saja.¹¹ Selain itu juga Sukarno hanya menempatkan Marxisme sebagai metode berpikir. Sedangkan dalam kaitannya pada pergerakan perjuangan, Sukarno menolak Materialisme yang merupakan akar dari Marxisme.

Harian Rakjat mencoba untuk membuat perbandingan atau sanggahan atas apa yang disampaikan oleh Sayuti Melik dengan gagasannya terkait dengan landasan filosofis dari Sukarnoisme maupun Marxisme. Gagasan tersebut dituangkan dalam artikel yang berjudul *Pemalsuan Dalam Hal Filsafat*.

“Kata Juti : „Bung Karno mempergunakan historis materialisme sebagai metode berpikir. Tetapi interpretasinja mengenai gejala² alam-semesta tidak mempergunakan filsafat materialisme”. Bandingkanlah tafsiran Juti ini dengan jang sesungguhnya dikatakan oleh Bung Karno sendiri didepan Kongres ke-VI PKI : „saja adalah seorang historis materialis. Tetapi saja bukan seorang wisgerij materialis... Historis materialisme adalah satu ilmu... Djika sosial-ekonominja pada waktu itu demikian, ideologinja adalah demikian... Ilmu inilah jang dinamakan historis materialisme, dan saja termasuk pengikut daripada ilmu ini”. Lalu apa jang diartikan Bung Karno dengan „wisgerij materialisme”? Ini tidak seperti ditafsirkan oleh seorang indoktrinator se-akan² adjaran Marx, melainkan djustru adjaran jang telah didjungkirbalikkan oleh Marx, jaitu adjaran Feuerbach.”¹²

⁹Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, (Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963) hlm. 277-278.

¹⁰Sayuti Melik, *Beladjar Memahami Sukarnoisme*, (Jakarta : Jajasan BP „Lontarsari”, 1964) hlm. 7.

¹¹Arief Priyadi, *op.cit.*, hlm. 163-164.

¹²Njoto, *BPS Aksi Reaksi*, (Jakarta : PT Rakjat, 1965) hlm. 18.

⁷Nazaruddin Syamsuddin, *PNI dan Kepoliticannya*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1984) hlm. 13.

⁸Surat Keputusan DPP-PNI No. 063/Pol/002/65. Jakarta: 8 Pebruari 1965.

Perdebatan antara Sayuti Melik dengan surat kabar PKI, *Harian Rakjat* berlanjut membahas mengenai klasifikasi latar belakang seseorang yang ingin menjadi seorang Marhaenis. Dalam artikel *Tjara Memahami*, Sayuti Melik menulis tentang 5 golongan yang dapat menerima Sukarnoisme dengan baik. Golongan yang dimaksud oleh Sayuti Melik yaitu golongan nasionalis, agama, sosialis, marhaen yang belum memiliki dasar ilmu perjuangan dan kaum reaksioner yang berasal dari kalangan borjuis kecil atau priyayi.

Sayuti Melik menambahkan bahwa golongan yang paling cepat dapat menerima Sukarnoisme adalah golongan Marhaen dan pemuda yang belum memiliki modal ilmu perjuangan. Sementara itu menurutnya golongan yang paling sulit menerima Sukarnoisme adalah priyayi atau borjuis kecil.

“...Menurut pendapat penjusun berdasarkan pengalamannya, yang paling mudah memahami dan terus memiliki Sukarno-isme adalah golongan yang sama sekali tidak mempunyai modal paham perjuangan tadi. Golongan rakjat Marhaen dan golongan pemuda. Tidak mempunyai modal sesuatu paham perjuangan yang telah matang, tetapi memiliki jiwa revolusioner, yang ditimbulkan oleh kenyataan penghidupan/ kehidupannya.” “...Adapun yang paling sukar memahami dan memiliki Sukarno-isme adalah golongan yang sudah mempunyai modal paham/ideologi reaksioner. Misalnja sadja paham² priyaji-isme, ndoro-denda-ju-isme, intelektualisme, bordjuisme (bordjuis-ketjil) dan togogisme!”¹³

Kelompok atau golongan yang telah diklasifikasikan oleh Sayuti Melik berdasarkan tingkat kesulitan untuk dapat menerima Sukarnoisme mendapat tanggapan dari *Harian Rakjat*. Surat kabar PKI tersebut menyangsikan Sayuti Melik telah merendahkan ajaran Marxis-Leninis pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa ajaran tersebut tidak murni.

“...Bahkan tgl. 12 November j.b.l, setelah pertemuannya dengan WPM Dr. Subandrio, Juti mengatakan bahwa bagi „yang belum mentjetjap salahsatu ideologi lain, Sukarnoisme memang mudah difahami. . . . Tetapi bagi yang lebih dulu sudah mentjetjap salahsatu ideologi tertentu, sebagai pribadi Sajuti sendiri, itu tidak mudah”. “...utjapannya tentang „yang lebih dulu sudah mentjetjap salahsatu ideologi tertentu” sangat berbau „Merdeka”isme, yang

mentjoba mengexkomunikasikan kaum Marxis-Leninis dari front nasional dengan dalih bahwa ideologi kaum Marxis-Leninis „tidak murni”¹⁴.

Pada artikel yang lain yakni yang berjudul *Tiga Ilmu Perjuangan* dan *Tiga Bahan Pokok Peladjaran*, Sayuti Melik menjelaskan tentang inti dari Sukarnoisme. Setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi bagian penting Sukarnoisme yang harus dipahami.

Bagian yang pertama dari Sukarnoisme adalah ilmu perjuangan bangsa yang bertujuan untuk membentuk masyarakat sosialis sesuai dengan kepribadian bangsa. Sayuti Melik menambahkan bahwa rumusan pokok yang pertama pada Sukarnoisme adalah sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme dapat juga berarti nasionalisme kerakyatan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Bagian kedua dalam Sukarnoisme adalah ilmu perjuangan yang berdasarkan kerakyatan. Prioritas dalam memperjuangkan keadaan rakyat untuk mencapai kesejahteraan adalah inti dari ajaran Sukarno. Sedangkan bagian yang ketiga adalah Ketuhanan. Sayuti Melik menjelaskan salah satu pernyataan presiden Sukarno bahwa selain kepada Tuhan yang merupakan pangkal utama kehidupan, berbakti kepada manusia adalah sebuah keharusan.¹⁵

Selain ketiga bahan pokok ilmu perjuangan, Sukarnoisme juga mengandung dua azas yaitu azas ideologi dan azas pergerakan. Azas ideologi dalam Sukarnoisme terdapat dua macam hal yaitu tujuan utama dan azas tujuan. Azas ideologi bersifat statis yakni tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan azas pergerakan dalam Sukarnoisme lebih bersifat dinamis, atau selalu berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi yang dihadapi. Azas pergerakan juga mengandung dasar dan tujuan dalam mencapai cita-cita.

Sayuti Melik juga menulis tentang perbedaan antara tiga instisari yang ada pada Sukarnoisme dengan Nasakom yang dicetuskan oleh Sukarno dan digunakan PKI sebagai alat legitimasi dalam konstelasi politik Indonesia. Melalui artikel yang berjudul *Antara Nasoma Dan Nasakom* ia menjelaskan tentang ketiga ilmu perjuangan yang ada dalam Sukarnoisme. Ia menggunakan inti nilai nasionalisme, sosialisme dan agama sebagai perwujudan ajaran Sukarnoisme. Ia menggabungkan ketiga unsur tersebut dan memberikan istilah Nasoma atau Nasasos.

Nasoma adalah ideologi Sukarno-isme yang harus diperjuangkan, dilaksanakan, sedang

¹³Sayuti Melik, *op.cit.*, hlm. 44.

¹⁴Njoto, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁵Sayuti Melik, *op.cit.*, hlm. 68.

kerdja-sama nasakom adalah tjara berdjuaang , jakni pokonja tjara menjusun kekuatan jang diperlukan untuk melaksanakan ideologi nasoma tadi. nasakom adalah perwujudan dari samenbundeling van alle revolutionnaire krachten, perwujudan dari semua gabungan kekuatan revolusioner.” “perlu ditjamkan benar², nasoma adalah susunan masyarakat jang hendak diwujudkan oleh Sukarno-isme. Sedang nasakom adalah kekuatan jang hendak disusun oleh Sukarno-isme, untuk mewudjutkan masyarakat nasoma tadi!” “dapat djuga dirumuskan demikian. Nasoma adlah azas-tudjuan, sedang Nasakom adalah azas perdjuaangan!”¹⁶

Nasoma dengan Nasakom memiliki perbedaan yang mendasar terkait dengan azas perjuangannya. Tentang pemberian istilah Nasoma, Sayuti Melik banyak menuai kritikan bahwa telah melakukan perubahan terhadap ajaran Sukarno. Walaupun demikian ia menyatakan menolak apabila dikatakan telah merevisi atau merubah ajaran Sukarno, khususnya tentang Nasakom. Sayuti Melik menganggap bahwa Nasasos dan Nasakom adalah dua hal serupa yang merupakan bagian dari ajaran Sukarnoisme.

Nasoma atau Nasionalisme, Sosialisme dan Agama termasuk dalam azas ideologi. Nasoma dalam Sukarnoisme tidak akan berubah-ubah. Nasoma adalah susunan masyarakat yang akan diwujudkan oleh Sukarnoisme. Istilah rumusan atau unsur-unsur dalam Nasoma dapat dirubah namun tetap dalam esensi yang sama yaitu kebangsaan, kerakyatan dan keagamaan. Selama masih terdapat sifat bangsa, sifat rakyat dan sifat agama dalam suatu negara, maka Nasoma akan tetap sesuai dalam rangka menjadi azas ideologi Sukarnoisme.

Sayuti Melik menjelaskan bahwa Nasakom atau Nasionalis, Agama dan Komunis adalah metode dalam melakukan perjuangan. Nasakom bersifat dinamis atau terdapat kemungkinan untuk berubah-ubah unsur yang ada didalamnya mengikuti keadaan yang sedang terjadi. Nasakom menjadi perwujudan kekuatan golongan yang memiliki legitimasi cukup kuat dalam masyarakat pada masa Demokrasi Terpimpin. Dalam pandangan Sayuti Melik, Nasakom terdiri dari tiga unsur yang memiliki substansi masing-masing. Oleh karena itu maka untuk menjalin sebuah kesepakatan maka harus dilakukan terlebih dahulu sebuah perundingan atau musyawarah. Selanjutnya ia menekankan bahwa terdapat kemungkinan

terjadi sebuah pertentangan antara unsur-unsur Nasakom satu sama lain karena sifatnya yang berdiri sendiri.¹⁷

Hal yang terpenting tentang Nasakom yaitu bagaimana terbentuknya sebuah persatuan. Sayuti Melik memandang perlu untuk diketahui bahwa dalam jalannya revolusi yang ideal menjadi pemimpin adalah Nasoma atau Sukarnoisme. Sedangkan apabila yang memimpin adalah Nasakom dengan unsur-unsur didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri, maka Sayuti Melik menilai akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena rumusan ideologi selalu menjadi pedoman bagi metode pergerakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan ideologi itu sendiri.

“Jang perlu didjelaskan ialah siapa jang harus memberi pimpinan. Dan djawabnja tidak dapat jang lain ketjuali „nasoma” tadi, artinja Sukarno-isme. Tidak dapat jang lain. Djika jang memimpin salah satu unsur/golongan sadja,- golongan nasionalis, golongan agama atau golongan komunis-, pasti akan menemui banjak kesukaran. Jang terang, pimpinannya itu akan lebih mengutamakan kepentingan golongannya sendiri, dan golongan² jang lain pasti akan menentangnja.” “Susulan: Dalam TAVIP (pidato 17 Agustus 1964), Bung Karno mempergunakan istilah „perasan Nasakom”. Pribadinja adalah „perasan Nasakom”. Nah hampir sama isinja dengan „perasan Nasakom” itulah istilah Nasoma.”¹⁸

Sementara itu terhadap pandangan Sayuti melik yang menyatakan bahwa kerja sama dalam Nasakom sangat mungkin terjadinya sebuah perpecahan, PKI melalui *Harian Rakjat* menyampaikan kritiknya. Kritik yang ditujukan kepada artikel Sayuti Melik khususnya yang membahas tentang Nasakom dan Nasoma tersebut diberi judul *Pemalsuan Terhadap Nasakom*. Kritik yang dimaksud dalam artikel tersebut ialah bahwa Sayuti Melik hanyalah seorang yang reaksioner, mendangkalkan revolusi dan Nasasos buah gagasannya juga merupakan Nasakom-Phobi.

Didalam Tavip Bung Karno menandakan : „Achirilah segala phobi²an, hentikanlah djegal²an dan srimpung²an, tulislah diatas pandjimu ‘Nasakom’ dan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 70.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 72.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 73.

sekali lagi 'Nasakom'... Unsur² keprogresifan itu terdapatlah disemua lapisan masyarakat Indonesia. ada dikalangan Agama. Ada dikalangan nasionalis. Ada dikalangan sosialis-komunis... Karena itu, maka Nasakom adalah keharusan progresif daripada revolusi Indonesia. siapa anti-Nasakom, ia tidak progresif! Siapa anti-Nasakom, ia sebenarnya adalah memintjangkan Revolusi, mendingklangkan Revolusi! Siapa anti-Nasakom ia tidak-penuh-revolusioner...!" " Juti dengan segala teori²nja tentang „Nasoma” dan „Nasasos”, jang hakekatnja adalah Nasakom-phobi, memang harus kita akui sebagai seorang ahli dalam... mendingklangkan revolusi, seorang jang tidak-penuh-Revolusioner.”¹⁹

Perjuangan dalam arti membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kolonialisme dan imperialisme berdasarkan prioritas untuk mengubah penderitaan menjadi kesejahteraan yang berbentuk sosialisme Indonesia merupakan misi utama Sukarnoisme. Masyarakat Indonesia yang telah mengenal Tuhan yang ditunjukkan dengan berbagai Agama dan kepercayaan yang berkembang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat teistik. Sukarno melakukan perjuangan dalam rangka pembebasan dan membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan dilandasi oleh keyakinan yang kuat akan kekuasaan Tuhan.

Sukarno telah menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat Indonesia memposisikan Tuhan sebagai muara dari segala hal, termasuk ilmu pengetahuan dan perjuangan. Kenyataan ini yang mendorong Sayuti Melik untuk berusaha keras dalam menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kepribadian Indonesia dengan paham Marxisme. Terutama mengenai materialisme yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah berasal dan dikendalikan oleh materi. Demikian pula dengan berbagai hal yang berkaitan dengan Ketuhanan yang harus disesuaikan dengan materi.²⁰ Tentu saja terhadap pernyataan Sayuti Melik yang semacam ini memancing *Harian Rakjat* untuk turut membela ideologinya yang dituangkan dalam artikel berjudul *Pemalsuan Dalam Hal Filsafat*.

Satu²nja „alasan” Juti mempertentangkan Marxisme dengan „Sukarno-isme” adalah soal tempat agama dalam Marxisme dan tempat unsur agama dalam nation building. Padahal djelas : nation building harus dengan menegakkan persatuan Nasakom, dan salahsatu unsur Nasakom adalah A. Bung Karno berpendapat bahwa adanja nasionalisme” dan adanja rasa keagamaan” di Indonesia jang „agraris” adalah „hal² jang objektif”, suatu pandangan jang sama dengan jang dianut Bung Aidit. Tetapi Juti lebih menjukai „paduan kreatif” : dia kawinkan „mechanisme” dengan „vitalisme”, materialisme dengan idealisme, dan Marxisme dengan mistik!”²¹

Mengenai pengertian Sukarnoisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia, Sayuti Melik menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa ajaran Marxisme-Leninisme dapat dijalankan dalam suatu negara apabila unsur-unsur yang ada di negara tersebut telah sesuai dengan Marxisme-Leninisme. Sedangkan Sukarnoisme adalah ajaran perjuangan yang menekankan pada persatuan bangsa. Sehingga ia menemui kesulitan tentang relevansi Marxisme-Leninisme apabila diterapkan di Indonesia yang menjadikan Agama sebagai salah satu landasan dalam bernegara.

Artikel Sayuti Melik ini agaknya menjadi suatu bentuk untuk menentang sepak terjang PKI dalam konstelasi politik di Indonesia terutama menjelang akhir masa Demokrasi Terpimpin. Dapat dikatakan setiap artikel menekankan bahwa ajaran Sukarnoisme berasal dari Indonesia, oleh Indonesia dan untuk Indonesia. Sehingga bukanlah sebuah ajaran yang datang dari luar yang diterapkan atau dipaksakan di Indonesia. Melalui harmonisasi keseluruhan unsur yang ada didalamnya, Sukarnoisme mampu menjadi sebuah identitas dan alat pemersatu bangsa.

Sayuti Melik banyak menunjukkan bahwa unsur Ketuhanan dalam Sukarnoisme tidak dapat dibantah lagi peran pentingnya. Sebagai alat perjuangan yang diterapkan dalam rangka membentuk sebuah masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme maka dibutuhkan suatu semangat juang. Perjuangan yang didasari oleh semangat

¹⁹ Njoto, *op.cit.*, hlm. 22-23.

²⁰ Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangsa: Pertentangan Sukarno vs Hatta*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 405.

²¹ Njoto, *op.cit.*, hlm. 19.

Ketuhanan, selaras dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Sukarno sebagai seorang tokoh yang bertuhan.

Dalam suasana politik yang memanas, Sayuti Melik yakin bahwa PKI harus dihentikan atau paling tidak mengurangi pengaruhnya didalam masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa PKI menjadi partai besar yang memiliki elektabilitas yang kuat di masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu, ia memaparkan bagaimana menjadi Sukarnoisme yang sesuai dengan kepribadian Indonesia secara umum. Pada setiap akhir artikelnya selalu terdapat sebuah paragraf tersendiri yang memuat kalimat-kalimat sindiran kepada satu pihak. Satu pihak yang dimaksud walaupun tidak disebutkan secara gamblang, namun Sayuti Melik sendiri mengkonfirmasi bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada PKI.

C. Dampak Artikel *Beladjar Memahami Sukarnoisme* Karya Sayuti Melik

a. Badan Pendukung Sukarnoisme

Artikel *Beladjar Memahami Sukarnoisme* memiliki popularitas yang luar biasa di masyarakat. Hal ini didasari dengan dukungan yang diberikan oleh presiden Sukarno pada awal mula penulisan ajaran-ajarannya yang digagas oleh Sayuti Melik. Tidak hanya melalui satu surat kabar yakni *Berita Indonesia*, artikel Sayuti Melik juga menarik banyak surat kabar lain untuk turut serta menerbitkan artikel tersebut. Surat kabar *Merdeka* yang pada pertengahan tahun 1964 terlibat perdebatan dan polemik yang sengit dengan surat kabar *Harian Rakjat* terkait dengan penyederhanaan satu partai juga turut serta menerbitkan artikel Sukarnoisme karya Sayuti Melik.

Selain surat kabar *Berita Indonesia* dan *Merdeka*, beberapa surat kabar yang diterbitkan di Jakarta juga memberikan dukungannya pada penerbitan artikel-artikel Sayuti Melik. Dari sekian banyak surat kabar yang beroperasi di Jakarta, mereka yang memberi dukungan yaitu, *Indonesian Observer*, *Warta Berita*, *Garuda*, *Berita Republik*, *Revolusioner*, *Mingguan Merdeka*, *Karyawan* dan *Majalah Udajana*. Selain itu surat kabar *Duta Masyarakat* yang merupakan surat kabar resmi NU, surat kabar *Sinar Harapan* dan warawan-wartawan kantor berita *Antara*, RRI serta TVRI juga menyatakan bahwa bersedia untuk menerbitkan dan menyebarkan artikel Sayuti Melik.

Sedangkan surat kabar yang terbit di luar Jakarta tidak kalah banyaknya untuk ikut berpartisipasi dalam penerbitan artikel Sayuti Melik. Antusias yang begitu tinggi dari masyarakat pada gagasan Sayuti Melik terutama dari golongan non partai dan golongan yang berseberangan dengan PKI dengan cepat membuat Sukarnoisme menjadi perhatian nasional. Surat kabar

yang terbit di berbagai kota besar di Indonesia yang bersedia menerbitkan artikel Sayuti Melik diantaranya yaitu *Pikiran Rakjat* yang terbit di Bandung, *Suara Merdeka*, *Tempo* dan *Sinar Indonesia* yang terbit di Semarang. Dukungan juga datang dari surat kabar di kota lain seperti *Suara Rakjat* yang terbit di Surabaya dan *Kedaulatan Rakjat* yang terbit di Yogyakarta. Selain itu surat kabar yang beroperasi di luar pulau Jawa turut pula mendukung penerbitan artikel Sayuti Melik, seperti *Patriot* dan *Mimbar Umum* yang terbit di Medan dan *Aman Makmur* yang terbit di Padang.

Didasari dengan tujuan yang sama antara Sayuti Melik dengan para tokoh jurnalis anti komunis yaitu untuk membendung pengaruh PKI dalam segala aspek dalam kontelasi politik di Indonesia, telah membuahkan terbentuknya suatu badan yang bergerak dalam bidang pers. Mengambil istilah yang sama dengan nama yang diberikan Sayuti Melik terhadap artikel-artikelnya tentang ajaran Sukarno, badan yang bergerak dalam bidang pers, radio dan televisi tersebut diberi nama Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). BPS dibentuk di Jakarta pada 1 September 1964.²² Artikel-artikel Sayuti Melik menjadi sumber dalam penyebaran ajaran Sukarno di masyarakat. Sedangkan BPS sebagai badan yang bertugas menjadi alat penyebaran ajaran-ajaran Sukarno tersebut kepada masyarakat luas.

Susunan organisasi BPS ialah mulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan harian dan biro-biro. Pimpinan tertinggi BPS pada pertama kali dibentuk yaitu mulai ketua hingga bendahara. Ketua BPS dijabat oleh Soemantoro dari surat kabar *Berita Indonesia*. Wakil ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Hiswara Dharmaputra dari *Merdeka* dan Joenoes Lubis dari *Warta Berita*. Sedangkan yang menjabat sebagai sekeretaris adalah Asnawi Idris dari *Merdeka* dan jabatan bendahara dipercayakan pada Drs. Sunarjo dari *Antara*.

Dibawah pimpinan tertinggi dalam susunan organisasi BPS masih terdapat komisaris yang sekaligus berfungsi sebagai pimpinan harian. Penghubung antara pimpinan tertinggi dengan pimpinan harian dipercayakan kepada Thung Adhyataman, seorang pembantu pribadi Adam Malik. Jabatan sebagai komisaris diberikan kepada beberapa perwakilan surat kabar yang tergabung dalam BPS. Komisaris-komisaris tersebut yaitu Mufti AS dari *Garuda*, Hidayat Rahardjo perwakilan *Revolusioner*, J.M Umbas dari *Berita Republik*, Syamsul Basri dari *Karyawan*, J.C.T Simorangkir, S.H perwakilan *Sinar Harapan*, J.K. Tumakaka dari *Mimbar Indonesia*, Sjamsuddin dari *Selecta* dan Sudjarwo.²³

²²Said Tribuana & Moeljanto D.S., *op.cit*, hlm. 37.

²³*Ibid.*, hlm. 38.

Selain pimpinan tertinggi dan pimpinan harian, dalam BPS masih terdapat anggota biro. Terdapat lima biro yang bertanggung jawab atas beberapa hal, diantaranya ialah biro ideologi/indoktrinasi, biro luar negeri, biro dalam negeri, biro *research*, bimbingan dan pengawasan serta biro keuangan. Sesuai dengan profesi dan keahliannya sebagai jurnalis sekaligus pemikir, Sayuti Melik dipercaya pada posisi biro ideologi/indoktrinasi dalam keanggotaan BPS. Sedangkan biro dalam negeri, luar negeri, *research* dan keuangan masing-masing berada dibawah kendali Sugiarto dari *Warta Berita*, Zein Efendi dari *Antara*, Wienaktu dari *Indonesian Observer* dan Drs. Sunardjo dari *Antara*.

BPS adalah aliansi pers yang bergerak secara independen dan tidak termasuk dalam keanggotaan PWI. Sebagai badan yang baru saja terbentuk, BPS telah mampu menarik perhatian banyak surat kabar. Ide dan gagasan BPS yang diuraikan dalam rumusan atau tujuan organisasi telah menjadi alasan kuat untuk menarik perhatian surat kabar lain yang anti PKI.

Tujuan dibentuknya Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) adalah mengembangkan, mempopulerkan dan menyebarluaskan ajaran Sukarnoisme gagasan Sayuti Melik melalui media pers, radio dan televisi. Penyebarluasan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat jalannya revolusi nasional dalam mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan berpedoman kepada Manipol/Usdek.²⁴ Oleh karena itu Surat kabar yang menyatakan sikap memberikan dukungan terhadap penerbitan artikel Sayuti Melik tentang Sukarnoisme, secara langsung telah menyetujui pula keanggotaannya dalam BPS.

Upaya yang akan dilakukan BPS untuk mencapai tujuannya yaitu dengan menjaga pelaksanaan indoktrinasi Sukarnoisme kepada masyarakat dengan cermat serta mencegah pembelokan atau upaya-upaya pengaburan terhadap ajaran Sukarnoisme dari berbagai pihak. Berusaha mengumpulkan literatur tentang ajaran-ajaran Sukarno sejak masa pergerakan hingga masa kemerdekaan. Selain itu juga ucapan atau cetusan Sukarno baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Berusaha untuk memberikan pasokan bahan-bahan ajaran Sukarnoisme kepada majalah, surat kabar, radio dan televisi anggota untuk dijadikan bahan ulasan.

BPS menyusun pedoman kerja dalam bentuk fungsi sosial pers nasional yang menyatakan sikap mendukung Sukarnoisme menjadi lima point rumusan. Fungsi sosial yang pertama adalah peran sebagai

pendukung kebijakan pemerintah pusat. BPS juga menyatakan berfungsi sebagai *social control*. *Social control* dalam arti mengawasi setiap kebijakan pemerintah beserta birokrasinya, angkatan bersenjata, perusahaan negara dan sebagainya dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan ketiga yaitu fungsi *fighting for* yang berarti meningkatkan sensitifitas terkait dengan praktik-praktik ketidakadilan sosial yang bersifat struktural.

Sedangkan fungsi keempat yaitu sebagai pihak yang aktif dalam melawan unsur-unsur kekuatan dalam segala bentuk yang dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Sukarno. Fungsi sosial yang kelima atau poin terakhir yang adalah *Nation building*.

PKI menganggap penyebaran artikel Sukarnoisme oleh berbagai media telah menjadi sebuah ancaman langsung terhadap legitimasi mereka dalam konstelasi politik Indonesia. Karena seperti yang dikatakan oleh pemimpin redaksi *Harian Rakjat*, Nyoto bahwa polemik atau pergolakan dalam bidang pers mengenai Sukarnoisme bukan hanya sekedar pertentangan dalam lingkungan jurnalistik. Nyoto menempatkan pergolakan tersebut dengan lebih dalam bahwa meningkatnya suhu jurnalistik Indonesia pada akhir 1964 telah menjadi ajang pertarungan politik yang luas.

Menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh pimpinan redaksi mereka, *Harian Rakjat* bergerak dengan melakukan ofensif terhadap konsistensi BPS. Mereka menganggap secara politis bahwa BPS sebagai organisasi atau Badan yang berpotensi besar dapat mengganggu rencana dan tujuan partai. Bahkan ketua CC PKI DN Aidit mengeluarkan instruksi khusus terkait sikap partai kepada BPS. DN Aidit menyerukan kepada semua comite daerah besar dan comite pulau PKI untuk bersama-sama mengganyang BPS.

Sesudah mempeladjar dengan teliti. Maka CC-PKI memperkuat kesimpulan yang pernah diambilnya tentang kesimpulan tentang Sukarnoisme-BPS. Sukarnoisme yang diadarkan BPS tidak lain adalah manikebuisme dibidang politik, sedangkan BPS adalah Liga Demokrasi gaja baru." "CC-PKI menjerukan kepada semua komunis Indonesia untuk bersama² dengan kekuatan manipolis lainnya mengganyang terus Sukarnoisme-BPS."²⁵

Harian Rakjat dan surat kabar lain seperti *Warta Bhakti*, *Bintang Timur* dan *Trompet Masjarakat* yang mamiliki haluan sama dengan PKI tidak hanya menyerang substansi artikel-artikel Sayuti Melik. Mereka

²⁴Merdeka, 10 Nopember 1964.

²⁵*Harian Rakjat*, 11 Desember 1964.

juga aktif dalam mengkampanyekan agar media penyebaran dan organisasi atau badan yang menjadi lanjutan dari penyebaran artikel tersebut supaya dapat dibubarkan. Surat kabar-surat kabar seperti Berita Indonesia, Merdeka dan Warta Berita menjadi sasaran utama aksi PKI dan Harian Rakjat. Badan Pendukung Sukarnoisme atau BPS juga tidak luput menjadi objek serangan PKI.

Dalam seruan itu PKI kembali mengeluarkan jargon-jargon yang biasa digunakan untuk menyebut pihak yang berseberangan dengan mereka. BPS dan Sukarnoisme karya Sayuti Melik tidak lebih hanya Manikebuisme dalam bidang politik dan Liga Demokrasi gaya baru, oleh karena itu harus dihabisi hingga tuntas.

Instruksi ketua CC PKI untuk mengganyang BPS ditindak lanjuti oleh Harian Rakjat untuk semakin gencar menyuarakan pembubaran BPS. Selain itu mereka menuntut untuk menghentikan penyebaran Sukarnoisme karya Sayuti Melik pada berbagai media. Penolakan terhadap Sukarnoisme dan BPS mendapat dukungan yang tidak sedikit dari berbagai elemen masyarakat, perwira militer maupun pemerintah.

Pihak-pihak yang kontra terhadap BPS seperti PKI, PNI, Partindo dan organisasi massa mereka terus berusaha untuk mendesak presiden Sukarno untuk membubarkan BPS. Pihak-pihak tersebut menyadari bahwa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membubarkan sebuah badan ialah presiden. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa BPS hanya akan menghambat jalannya revolusi dan dianggap sebagai badan yang reaksioner, maka presiden Sukarno membubarkan BPS.

Secara resmi presiden Sukarno membubarkan BPS melalui keputusan No. 72/KOTI/1964 pada 17 Desember 1964. Dalam keputusan tersebut presiden Sukarno menyebut bahwa BPS ialah sebuah badan yang membawa risiko terhadap perpecahan rakyat Indonesia sehingga dapat berdampak mengganggu jalannya revolusi. Sedangkan untuk menampung segala persoalan yang mungkin ditimbulkan dari keputusan pembubaran BPS, presiden Sukarno menugaskan Kotrar sebagai penanggung jawab. Amanah tersebut disampaikan pada keputusan No. 73/KOTI/1964.

Segecap pimpinan BPS di Jakarta dan Medan mengeluarkan sikapnya bersamaan dengan keputusan presiden No. 72/KOTI/1964 dan No. 73/KOTI/1964 yang telah diumumkan secara luas. Para pimpinan BPS menyiapkan pernyataan pembubaran diri dan tetap mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah. Pengumuman pembubaran diri yang disampaikan di kantor pusat BPS di Jakarta ditandatangani oleh Soemantoro dan Asnawi Idris. Sedangkan di Medan segecap pengurus BPS mengumumkan pada 17

Desember 1964 menyatakan pembubaran diri dan menghentikan segala aktifitasnya.

b. Dampak Pada Masyarakat

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam bidang pers, dapat ditemukan banyak surat kabar yang bersedia menerima, mendukung dan terlibat dalam penyebaran Sukarnoisme karya Sayuti Melik. Secara lebih luas penerbitan artikel Sayuti Melik oleh banyak surat kabar di Indonesia itu juga berdampak pada popularitas Sukarnoisme didalam masyarakat.

Sementara itu eksistensi BPS sebagai badan yang bertanggung jawab menyebarkan Sukarnoisme karya Sayuti Melik dalam bidang pers telah mempertajam perbedaan pemikiran atau idealisme masyarakat. Selain itu juga semakin memperjelas keberpihakan masyarakat terhadap dua kubu yang terlibat polemik yaitu PKI beserta pendukungnya dan BPS. Tentu saja bagi berbagai kalangan dari beragam profesi dan status yang memiliki sikap anti PKI menunjukkan dukungannya terhadap BPS. Pada kenyataannya BPS berhasil mendapat dukungan yang luas dari berbagai kalangan di tanah air.

Dukungan terhadap BPS dapat dilihat dari elemen pelajar yang berasal dari Maluku Utara. Mereka menyatakan sikapnya mendorong BPS agar dapat dijadikan sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menyebarkan Sukarnoisme. Melalui Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pelajar Mahasiswa Maluku (PPMMU), para pelajar dan mahasiswa mendesak presiden memberikan sikap terhadap BPS. Desakan tersebut mereka lakukan karena menilai bahwa masih terdapat berbagai penafsiran berdasarkan perbedaan pandangan terhadap ajaran Sukarnoisme.²⁶

Organisasi-organisasi mahasiswa yang berada di Sumatera Utara juga memberikan dukungan penuh kepada ajaran Sukarnoisme untuk dapat dijadikan sebagai doktrin revolusi Indonesia. Organisasi-organisasi mahasiswa yang menyatakan dukungan pada Sukarnoisme ialah Gerakan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (GERMAII), Pelopor Mahasiswa Sosialis Sumatera Utara (Pelmas), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi), Mahasiswa Pancasila, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Pernyataan dukungan masing-masing organisasi mahasiswa tersebut sudah pasti mencerminkan sikap dewan pengurus pusat serta telah mewakili sikap cabang-cabang organisasi di daerah lain di Indonesia.

Walaupun mendapat banyak tekanan dari pihak-pihak yang selama ini menentang kehadiran Himpunan

²⁶Merdeka, 15 Desember 1964.

Mahasiswa Islam (HMI) di masyarakat semakin meningkat, namun organisasi HMI akan tetap tegas mengamalkan Sukarnoisme. Melalui ketua Departemen Penerangan dan Indoktrinasi Pengurus Besar atau Deppenin PB HMI Sjams Alamsjah menyatakan bahwa pernyataan presiden Sukarno bahwa hidupnya semata-mata untuk mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa adalah sebuah penegasan yang jelas untuk menjadikan Sukarnoisme sebagai pegangan organisasi.²⁷

Tidak hanya organisasi-organisasi kemahasiswaan, dukungan terhadap Sukarnoisme dan BPS juga dapat dilihat dari berbagai organisasi pekerja. SOKSI melalui Musyawarah Kerja Nasional yang ke II pada 24 Nopember 1964 di Bandung mendukung Sukarnoisme. Sikap dukungan tersebut dipertegas dengan pernyataan ketua SOKSI Drs. Suhardjiman yang mengatakan bahwa Sukarnoisme adalah sebuah ajaran yang revolusioner sehingga harus dilaksanakan dan dikembangkan.²⁸

Selain SOKSI, terdapat beberapa organisasi pekerja yang menyatakan dukungannya yaitu GERTAMI (Gerakan Tani Nelayan Muslimin Indonesia), TGP (Tenaga Guna Pembangunan) dan Konsentrasi Karyawan Niaga Negara. TGP menyatakan bahwa seluruh ajaran-ajaran Sukarno dapat membuat revolusi Indonesia menjadi revolusi yang terbesar dan termodern dijamannya. Sedangkan GERTAMI dan Konsentrasi Karyawan Niaga Negara sepakat terhadap Sukarnoisme untuk diimplementasikan sebagai azas organisasi mereka. Ketua GERTAMI bahkan menambahkan bahwa BPS harus diberi tugas untuk memperjelas jalannya sejarah dan kewenangan untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman atau salah tafsir atas ajaran-ajaran Sukarno yang sebenarnya.²⁹

Begitu juga sebaliknya, unsur-unsur masyarakat dan berbagai organisasi yang berafiliasi dengan PKI, PNI dan Partindo tentu menolak kehadiran BPS ditengah-tengah mereka. Dapat dicermati satu peristiwa dimana organisasi Pemuda Rakyat dan CGMI yang berafiliasi dengan PKI melakukan tindakan-tindakan vandalis sebagai bentuk kecaman mereka terhadap BPS. Mereka melakukan pengerusakan terhadap tembok-tembok yang telah dipenuhi dengan coretan-coretan yang berbunyi mendukung BPS dan ganyang PKI oleh para pemuda anti PKI dan beberapa orang wartawan BPS di Jakarta.

Penolakan terhadap BPS juga datang dari salah satu perwira tinggi TNI yaitu Brigadir Jenderal Broto Sewoyo. Ia selaku kader revolusi No. 522 menyatakan bahwa BPS dan Sukarnoisme karya Sayuti

Melik hanyalah alasan atas terjadinya berbagai perpecahan dimasyarakat. Ia menjelaskan bahwa BPS telah menimbulkan polarisasi kelompok-kelompok yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu ia mengajukan sebuah permintaan melalui surat yang ditulisnya kepada presiden Sukarno untuk membubarkan BPS dan mengakhiri segala polemik tentang Sukarnoisme.³⁰

Demikian halnya dengan para ketua organisasi diluar afiliasi kepartaian yang sekaligus adalah kader dan simpatisan partai yang kontra BPS, maka gerak organisasi yang dipimpinnya tersebut dapat diarahkan untuk melawan BPS. Seperti organisasi wartawan PWI dibawah kepemimpinan Karim D.P telah diarahkan menjadi cenderung kontra terhadap BPS dan mendukung segala upaya PKI untuk menyingkirkan BPS. Bahkan ketika BPS telah resmi dibubarkan, para petinggi PWI melakukan pemecatan terhadap wartawan-wartawan yang sebelumnya merupakan pendukung BPS.

PENUTUP

Simpulan

Demokrasi terpimpin sejak awal diperkenalkan oleh Sukarno sebagai metode yang tepat untuk mencapai cita-cita revolusi Indonesia dengan semangat persatuan tenaga-tenaga revolusioner. Sukarno ingin menyatukan golongan-golongan berbeda yang memiliki basis masa yang kuat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita revolusi Indonesia. Nasakom adalah salah satu konsep Sukarno yang digagasnya dalam rangka penyatuan tenaga-tenaga yang dianggap revolusioner tersebut.

Perbedaan ideologi yang terpelihara terutama pada konstelasi politik Indonesia nampaknya menjadi sebuah alasan sulitnya mewujudkan persatuan. Sehingga pada masa Demokrasi Terpimpin pertentangan-pertentangan satu pihak dengan pihak yang lain masih terjadi. Dapat dikatakan bahwa demokrasi terpimpin tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya yakni masa demokrasi parlementer yang memang banyak melahirkan pergolakan-pergolakan.

Pergolakan-pergolakan yang terjadi dalam berbagai bidang pada masa Demokrasi Terpimpin seringkali melibatkan PKI disatu pihak dengan lawan-lawan politiknya dilain pihak. PKI selalu bersikap mendukung kebijakan Sukarno sehingga mereka berhasil mendapatkan legitimasi yang kuat. Atas pergerakan PKI yang semakin kuat dalam konstelasi politik Indonesia tersebut telah mendorong pihak-pihak yang dapat

²⁷Merdeka, 11 Desember 1964.

²⁸Merdeka, 24 Nopember 1964.

²⁹Merdeka, 15 Desember 1964.

³⁰Surat Broto Sewoyo. Brigjen TNI, Kepada Panglima Besar/Wakil PM I Dr. Subandrio di Jakarta tentang *Sumbangan Fikiran Tentang Perlunya Adanya Tindakan Menghentikan Heboh "B.P.S."/ "Sukarnoisme"*, Jakarta, 10 Desember 1964.

dikatakan sebagai anti PKI untuk bergerak berusaha meredam pergerakan partai tersebut.

Sayuti Melik sebagai tokoh senior perjuangan yang memiliki sikap anti PKI merasa perlu untuk berkontribusi dalam meredam aksi partai tersebut. Melalui pengetahuannya tentang Marxisme-Leninisme dan Marhaenisme ia menulis artikel bersambung dengan judul *Beladjar Memahami Sukarnoisme*. Tujuan penulisan artikel tersebut adalah mencapai pribadi pengikut Sukarno yang baik dengan menguraikan perbedaan antara Marxisme-Leninisme dengan Marhaenisme atau Sukarnoisme. Perbedaan yang dimaksud ialah terletak pada Sukarnoisme yang menerapkan dialektis idealisme dan juga dialektis materialisme secara bersamaan, sedangkan Marxisme-Leninisme hanya menggunakan dialektis materialisme saja. Kemudian Marxisme lebih ditempatkan sebagai metode berpikir dan tidak sebagai acuan dalam metode perjuangan.

Artikel Sayuti Melik menjadi salah satu topik yang digunakan sebagai ajang pertentangan antara PKI dengan golongan anti PKI. Dalam hal ini artikel Sayuti Melik didukung oleh Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). BPS berperan dalam upaya penyebarluasan doktrin Sukarnoisme dalam berbagai metode. Metode yang dilakukan BPS dalam menyebarkan Sukarnoisme adalah dengan melakukan berbagai ceramah, kursus-kursus dan indoktrinasi terhadap para pimpinan surat kabar.

Pada akhir tahun 1964 adalah saat dimana kedua belah pihak yang terlibat pertentangan tentang ajaran-ajaran Sukarno berlomba-lomba untuk merebut simpati dari presiden Sukarno. Pada kenyataannya Sayuti Melik dapat dikalahkan oleh PKI atas restu dari presiden Sukarno yang diwujudkan dengan pembubaran BPS. Hal tersebut juga sekaligus menandai akhir dari penerbitan dan penyebarluasan artikel Sayuti Melik.

Saran

Indonesia adalah sebuah negara yang plural tidak hanya dilihat dari suku bangsa dan kebudayaan, namun juga ideologi. Kekayaan ideologi ini muncul dan tumbuh subur sejak masa pergerakan dengan tujuan bersama yaitu pembebasan Indonesia atas kolonialisme. Keberagaman ideologi yang tidak jarang saling bertentangan ini menimbulkan permasalahan terutama pada 1926, 1948 dan 1965. Sehingga sebagai bangsa yang besar dengan dasar negara yang kokoh kita harus kembali dan memegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 agar tetap dapat terjalin sebuah persatuan dalam perdamaian. Penelitian “Polemik Artikel Beladjar Memahami Sukarnoisme Karya Sayuti Melik Tahun 1964” dapat digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan

khususnya dalam mempelajari materi sejarah yang berkaitan dengan pers, politik dan ideologi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi pada materi mata pelajaran sejarah kelas XII KD 3.4, mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Surat Keputusan DPP-PNI No. 063/Pol/002/65. Jakarta: 8 Pebruari 1965.

Surat Broto Sewoyo. Brigjen TNI, Kepada Panglima Besar/Wakil PM I Dr. Subandrio di Jakarta tentang *Sumbangan Fikiran Tentang Perlunya Adanya Tindakan Menghentikan Heboh “B.P.S”/“Sukarnoisme”*, Jakarta, 10 Desember 1964.

Surat Kabar

_____. 1964. “Maksud / Tujuan ‘Badan Pendukung Sukarno-isme’”. Dalam *Merdeka*, 10 Nopember. Jakarta.

_____. 1964. “Gerakan Tani Muslimin Indonesia Dukung Sukarnoisme ”. Dalam *Merdeka*, 15 Desember. Jakarta.

_____. 1964. “Dep. Pen. & Indoktrinasi PB.HMI. : Sukarnoisme Milik Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam *Merdeka*, 11 Desember. Jakarta.

_____. 1964. “Ketua Umum SOKSI Drs. Suhardiman : Sukarnoisme Adalah Adjaran² Revolusioner Jg Perlu Dikembangkan”. Dalam *Merdeka*, 24 November. Jakarta.

_____. 1964. “Djadikan BPS Satu²nja Lembaga Nasional Penjebar Soekarnoisme : Desakan Peladjar & Mahasiswa Maluku Utara”. Dalam *Merdeka*, 15 Desember. Jakarta.

_____. 1964. “Instruksi CC-PKI Ganjang Terus BPS!”. Dalam *Harian Rakjat*, 11 Desember. Jakarta.

Internet

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3012/Suluh-Indonesia>. diakses pada 13 Agustus 2016, pukul 16.00 WIB.

Buku

Alam, Wawan Tunggul.2003.*Demi Bangsa: Pertentangan Sukarno vs Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Melik Sayuti. 1964. *Beladjar Memahami Sukarnoisme*, Jakarta: Jajasan BP „Lontarsari”.

Nazaruddin Syamsuddin. 1984.*PNI dan Kepolitikannya*. Jakarta : CV. Rajawali.

Njoto. 1965. *BPS : Aksi Reaksi*. Jakarta : PT. Rakyat.

Priyadi, Arief. 1986.*Wawancara Dengan Sayuti Melik*, Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

- Siraishi, Takashi. 2001. *Hantu Digoel : Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*, Yogyakarta : LkiS Yogyakarta.
- Suhartono. 2016. *Kaigun: Angkatan Laut Jepang Penentu Krisis Proklamasi*, Yogyakarta : Impulse.
- Sukarno. 1963. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya